



Bali Post



Dewan Dukung Pemkab Kejar Target

APBD 2015 Raih WTP

ingaraja (Bali Post) -

Raihan prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang pertama kalinya direbut dalam kaitan pertanggungjawaban keuangan pemerintah itu menjadi kebanggaan Pemkab Buleleng. Tetapi, disadari ke depan keberhasilan ini merupakan tantangan dalam mempertahankan prestasi itu.

Pemkab Buleleng pun bertekad meraih WTP APBD tahun 2016 kelak. Atas target ini, lembaga dewan di Buleleng kompak mendukung agar pemerintah bisa mencapai harapannya itu. Dalam upaya, mewujudkan cita-cita itu, lembaga dewan meminta jajaran pemerintah daerah bekerja ekstra keras dalam hal pelaporan keuangan pemerintah.

Dukungan penuh lembaga dewan tersebut diungkapkan masing-masing fraksi di DPRD Buleleng pada sidang paripurna, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD tahun 2014, Kamis (23/7) lalu di ruang sidang DPRD Buleleng.

Sidang dipimpin Ketua DPRD Buleleng, I Gede Supriatna. Acara itu dihadiri oleh Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjindra serta unsur Muspida dan pimpinan SKPD. Enam fraksi masing-masing, PDI-P, Golkar, Demokrat, Hanura, Gerindra, dan NasDem, seluruhnya dapat menerima LPJP APBD tahun 2014 tersebut.

Seperti diungkapkan juru bicara dari gabungan Fraksi PDI-P dan NasDem Gusti Made Artana. Politisi asal Desa Baktiseraga, Ke-

camatan Buleleng ini menyambut positif prestasi yang telah diraih pemerintah daerah terkait pelaporan keuangan pemerintah, dengan predikat WTP di tahun 2014. Tahun ini wakil rakyat kembali menuntut agar seluruh pimpinan SKPD bekerja keras, mempertahankan prestasi yang telah diraih itu pada tahun anggaran 2015. "Kami mendukung dan meminta Bupati dan jajarannya menjadikan prestasi tahun 2014 ini sebagai motivasi dan bekerja keras agar bisa meraih prestasi yang sama di tahun ini," katanya.

Penuhi Akuntabilitas dan Legalitas

I Made Mangku Ariawan, juru bicara gabungan Fraksi Golkar, Demokrat, dan Gerindra mengatakan hal senada. Dikatakan, mempelajari dan membahas di tingkat fraksi atau gabungan komisi laporan keuangan yang disampaikan eksekutif telah memenuhi prinsip akuntabilitas, legalitas, dan transparansi sesuai PP No. 24 Tahun 2005 dan Permerdagri No. 13 Tahun 2006. Atas kondisi ini tidak salah kalau BPK RI, memberikan penilaian dengan predikat WTP. Politisi asal Desa Panji, Sukasada ini menyarankan agar SKPD di Buleleng meningkatkan kemampuan SDM-nya. Hal ini karena permasalahan masih dialami di tahun 2014 lalu, sehingga di tahun ini perlu dilakukan penyempurnaan. Dan ujung-ujungnya, target merebut kembali WTP dapat tercapai. "Saya kira peningkatan SDM di SKPD harus dilakukan, sehingga permasalahan yang terjadi

Edisi : Sabtu, 25 Juli 2015

Hal : 11



Sambungan - -

di tahun sebelumnya bisa diatasi, sehingga tahun ini saya yakin akan bisa meraih prestasi yang sama," imbuhnya.

Atas tanggapan lembaga dewan itu, Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjindra, Sp. OG. mengatakan, menginjak tahun 2015 ini, pihaknya sudah melakukan upaya dan strategi mempertahankan WTP di tahun ini. Bahkan, belakangan ini Bupati Buleleng telah menginstruksikan kepada semua jajarannya bekerja lebih keras mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan

yang sudah disusun dalam APBD Buleleng. Selain menekankan agar pimpinan SKPD bekerja lebih keras lagi, pengawasan dalam pelaksanaannya selalu ada kontrol setiap minggunya. Apalagi laporan penggunaan keuangan itu menganut sistem berbasis akrual yang bisa langsung dipantau setiap harinya. "Melalui setiap pertemuan dan rapat evaluasi kita sudah instruksikan SKPD bekerja lebih giat lagi, sehingga APBD bisa dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai regulasi yang ada," katanya. (kmb38)



Bali post/kmb38

LPJP - Juru bicara fraksi-fraksi di DPRD Buleleng menyampaikan pandangannya terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD tahun 2014.



Disorot, Piutang Daerah Kota Denpasar Terus Meningkat

Denpasar (Bali Post) –

Piutang retribusi dan pajak daerah yang terus meningkat setiap tahunnya, menjadi perhatian jajaran Fraksi Demokrat DPRD Kota Denpasar. Fraksi ini meminta pemerintah daerah untuk memikirkan dan menerapkan kebijakan lebih lanjut untuk mengurangi jumlah piutang pajak daerah pada tahun-tahun mendatang. Hal tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Denpasar dengan agenda pendapat akhir fraksi atas enam ranperda yang diajukan eksekutif, Kamis (23/7) lalu.

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede dihadiri Wali Kota I.B. Rai Dharmawijaya Mantra. Dalam pandangan akhir Fraksi Demokrat yang dibacakan I Gede Semara menyebutkan, sejak tahun 2010 lalu hingga 2014, terjadi peningkatan piutang pajak daerah secara signifikan. Pada 2010 terjadi piutang pajak Rp 7,208 miliar, meningkat pada tahun berikutnya menjadi Rp 8,017 miliar, disusul pada 2012 mencapai Rp 8,589 miliar.

Peningkatan yang cukup drastis terjadi pada 2013, di mana piutang pajaknya mencapai Rp 188,318 miliar lebih. Sedangkan pada 2014 lalu, piutang pajak kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 202,039 miliar. Sementara untuk piutang retribusi, mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Fraksi Demokrat juga mengharapkan adanya klarifikasi atau penjelasan secara rinci, karena ada selisih sebesar Rp 4,997 miliar. Saldo akhir piutang daerah 2013 sebesar Rp 210,10 miliar, sedangkan saldo awal 2014 tercatat Rp 205,13 miliar. Seharusnya, saldo akhir tahun 2013 secara otomatis menjadi saldo akhir pada 2014.

Di sisi lain, Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Muhammad Nuh Fatah meminta agar SKPD lebih cermat dalam menyusun perencanaan agar tidak lagi menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang tinggi. Mengingat, selama ini masyarakat menilai tingginya silpa bukan merupakan sebagai bentuk efisiensi, melainkan lemahnya dalam hal perencanaan.

Terhadap sejumlah saran dan kritik yang disampaikan para wakil rakyat itu, Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra menilai sebagai sebuah masukan yang sangat positif untuk membangun Denpasar ke depan. Pihaknya berjanji akan melakukan perbaikan dengan melihat urgensi masing-masing persoalan yang ada. (kmb12)



Geredeg-Sukerana Sisakan 27.800 Penduduk Miskin

Amlapura (Bali Post) -

Penanganan kemiskinan masih menjadi pekerjaan berat bagi para pemerintah daerah. Selama sepuluh tahun terakhir,

jumlah penduduk miskin tidak banyak berubah. Hingga duet mantan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Wayan Geredeg dan Made Sukerana lengser, Pemkab

Karangasem masih menyisakan 27.800 penduduk miskin.

Data statistik penduduk miskin yang diperoleh di Bappeda Karangasem, menunjukkan angka jumlah penduduk miskin tiap tahun naik-turun. Namun, hingga data terakhir jika dibandingkan dengan data sepuluh tahun lalu, jumlah penduduk miskin malah terjadi tren kenaikan. Sebelum Wayan Geredeg menjabat, jumlah penduduk miskin tahun 2004 sebanyak 25.900 (6,51 persen). Kemudian pada awal Geredeg menjabat berduet dengan Gusti Lanang Rai, mereka sudah dibebani dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 30.300 (7,67 persen). Tahun 2006, penduduk miskin naik lagi jadi 35.800 (9,42 persen).

Namun, setelah kenaikan tersebut, perlahan Pemkab Karangasem maju menurunkan kembali jumlah penduduk miskin di Karangasem. Pada tahun 2007 menjadi 34.100 (8,95 persen), tahun 2008 menjadi 29.500 (7,67 persen), dan tahun 2009 menjadi 24.700 (6,37 persen). Tetapi, tren



Bali Post/dok

MISKIN - Potret keluarga miskin di sebuah desa di Karangasem. Selain kondisi rumah mereka memprihatinkan, taraf kesehatan mereka juga menyedihkan.

penurunan angka penduduk miskin ini berakhir pada tahun 2009. Sebab, tahun 2010 jumlah penduduk miskin sudah naik lagi menjadi 31.598 (7,95 persen). Tahun 2011 sempat turun lagi menjadi 26.126 (6,43 persen), tahun 2012 turun lagi menjadi 22.940 (5,63 persen). Data terakhir tahun 2013, jumlah penduduk miskin naik lagi menjadi 27.800 (6,88 persen). Sementara tahun 2014, data dikatakan belum ada.

Kepala Bappeda Karangasem Ketut Sedana Merta, Rabu (22/7) lalu berdalih, peningkatan angka jumlah penduduk terakhir ini, terjadi karena faktor inflasi. Meski mengakui adanya peningkatan, namun Sedana Merta menegaskan Pemkab Karangasem di bawah kepemimpinan mantan Bupati Wayan Geredeg selama sepuluh tahun terakhir, sudah melakukan berbagai upaya maksimal. "Kita tentu tidak bisa menilai kinerja seseorang secara subjektif dari satu sisi. Masih banyak capaian membanggakan yang diraih bapak Wayan (Geredeg) selama memimpin

Karangasem," tegasnya.

Sedana Merta menegaskan, Karangasem seharusnya tidak hanya dilihat dari kemiskinannya. Tetapi, di luar itu, ia menilai Karangasem adalah kabupaten yang perkembangannya sangat pesat dalam sepuluh tahun terakhir di Bali. Sementara, mantan Wakil Bupati Karangasem, Made Sukerana, belum lama ini, mengakui penanganan kemiskinan menjadi tantangan terberat di Karangasem. Ia yang bakal maju menjadi calon Bupati Karangasem, mengaku akan melanjutkan rancangan penanganan kemiskinan yang sudah disusun bersama Geredeg selama lima tahun terakhir.

Selain kemiskinan, pekerjaan berat lainnya yang masih menunggu adalah masalah distribusi air bersih. Ia yakin, keberadaan air bersih akan memengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat Karangasem. "Masalah air akan menjadi prioritas saya. Saya ingin Karangasem cerdas, sehat, dan bermartabat," tegasnya. (kmb31)



Kasus Dugaan Korupsi "Fraud" di BPD Bali Target Penuntutan Tahun Ini, Jaksa Minta Ahli ke OJK

Denpasar (Bali Post) -

Kasus dugaan korupsi dengan modus *fraud*, yakni deposito fiktif hingga mencapai Rp 1,7 miliar di BPD Bali Cabang Tabanan dengan tersangka Wayan Sukaja, masih mempertajam keterangan ahli. Pemberkasan kasus ini belum rampung. Informasi teranyar, bahwa pihak penyidik minta bantuan OJK (otoritas jasa keuangan) untuk dijadikan ahli dalam perkara ini. "Ya, kita baru minta ahli OJK. Kita sudah bersurat, dan sampai saat ini belum ada konfirmasi dari OJK," ujar penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali Wayan Suardi saat mendampingi Aspidus Erna Normawati, Kamis (23/7).

Yang jelas, sambung Aspidus Erna, bahwa pihaknya tahun ini menargetkan enam kasus untuk

dibawa ke Pengadilan Tipikor Denpasar. "Ya, salah satunya BPD Bali kita target penuntutan sebelum akhir tahun ini," ucap Erna Normawati.

Disinggung soal kemungkinan bertambahnya tersangka, penyidik belum mau membeber. "Sampai saat ini baru satu tersangka. Soal kemungkinan tersangka lain, kita tunggu perkembangan hasil penyidikan. Yang jelas, saat ini kita sudah bersurat ke OJK," sambung Suardi.

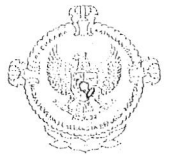
Sebagaimana diketahui, kasus ini menetapkan Wayan Sukaja, mantan karyawan bagian *marketing* dan kredit di Bank BPD Cabang Tabanan sebagai tersangka. Untuk memperdalam kasus ini, sejumlah saksi sudah diperiksa. Terakhir yang dimintai keterangan adalah Dirut Bank BPD Bali

Made Sudja dan mantan Plt. BPD Cabang Tabanan 2013-2014, Wayan Suartika.

Terungkapnya kasus ini, bermula dari adanya pemeriksaan satuan audit internal dan anti *fraud*. Itu juga dilatari atau didahului pemeriksaan dan pembandingan data dan verifikasi serta menganalisa aktivitas *teller* dengan bukti transaksi yang terindikasi *fraud*. Yang menarik dari informasi di kejaksaan, akibat perbuatan tersangka, kemungkinan besar kerugian negara akan bertambah dari Rp 1,7 miliar. Ini dikarenakan bunga tetap dihitung. "Walau sudah ada yang dikembalikan, namun bukan berarti bisa menghapus perbuatan pidananya," jelas salah seorang petugas kejaksaan. (kmb37)



Bali Post



Kasus Pengadaan Tanah PDAM Karangasem Kejati Segera Tetapkan Tersangka

Denpasar (Bali Post) -

Setelah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan mengumpulkan data serta turun langsung ke Karangasem hingga ditemukannya unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH), penyidik Kejati Bali segera menetapkan tersangka atas pengadaan tanah PDAM Karangasem. "Dua minggu lalu sudah direkomendasikan untuk ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan," sebut ketua tim penyidik Dr. Akmal Kodrat saat mendampingi Aspidus Kejati Bali Erna Normawati, Kamis (23/7).

Dijelaskannya, berdasarkan rekomendasi itu, calon tersangkanya dari internal PDAM. Siapa internal PDAM itu? "Ini baru rekomendasi tersangka tim penyidik. Ini belum tersangka, tetapi calon tersangka dan dia adalah pihak yang bertanggung jawab," sebut jaksa tanpa mau menyebut inisial. Saat didesak lagi siapa calon tersangka sesuai rekomendasi itu, Aspidus Erna Normawati mengatakan, dari internal PDAM. "Tunggu tanggal mainnya. Nanti kita umumkan," sebut Erna.

Soal motif, kata penyidik, yang mengerucut adalah pengadaan tanah. Ini ada indikasi *mark-up*. Namun, lagi-lagi jaksa tidak mau membeber kerugian negara sebagaimana potensi dimaksud. "Yang jelas, ada potensi kerugian negara," sebut penyidik.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah petugas kejaksaan seperti Raka Arimbawa, Agus, dan penyidik lainnya, kerap melakukan pemeriksaan saksi atas dugaan penyelewengan di PDAM Karangasem. Pemeriksaan tidak dilakukan di pidsus, namun di ruangan jaksa fungsional. Sejumlah pejabat di Karangasem sudah dimintai keterangan, termasuk pejabat di internal PDAM. (kmb37)

Edisi : Sabtu, 25 Juli 2015

Hal : 3



Misterius, Barang Bukti Kasus Korupsi IHDN

Denpasar (Bali Post) -

Nyoman Budi Permadi, terdakwa kasus korupsi uang barang bukti penyitaan kasus korupsi Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, sudah divonis selama 15 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar, pimpinan Achmad Paten Silli. Walau Budi Permadi sudah mendekam di Lapas Kerobokan, namun persoalan barang bukti masih misterius. Pasalnya, Rp 944 juta yang diklaim sebagai kerugian keuangan negara, dan senilai itu pula yang ada dalam putusan majelis hakim.

Namun fakta dalam persidangan, terungkap bahwa uang barang bukti yang diambil mencapai Rp 1,7 miliar. Sebab, selain barang bukti (BB) IHDN, ada BB kasus lain yang juga diembatnya. BB dari 944 juta menjadi Rp 1,7 miliar inilah yang kini menjadi pertanyaan banyak pihak. Awalnya, sempat terungkap bahwa barang bukti ada dari kasus Garuda. "Setahu kami, Budi Permadi hanya menggunakan BB kasus korupsi IHDN. Kami tidak mengetahui tentang kerugian yang lainnya yang dimasukkan dalam vonis tersebut," ucap Kasi Penyidikan, Akmal Kodrat didampingi Kasi Eksekusi, Wayan Suardi, belum lama ini.

Dijelaskannya, Pidsus Kejati Bali justru menjadi pelapor/korban dalam perkara ini,

walau terdakwa (kini terpidana) adalah staf pidsus. Disinggung soal uang lebih sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, seperti pengakuan uang barang bukti kasus Garuda sebesar Rp 250 juta, Suardi mengaku tidak mengetahui karena belum menjabat saat itu. "Soal kasus Garuda, saya tidak mengetahui dan tidak menanganinya. Kami tidak pernah menerima titipan uang tersebut. Kebetulan bidang eksekusi ada di bidang saya. Sampai saat ini, tak ada titipan dari Garuda," tegasnya.

Lantas, uang apa yang jumlahnya mencapai Rp 1,7 miliar? Belum ada yang bisa menjelaskan secara rinci atas uang lebih tersebut. Jaksa hanya mengaku, bahwa uang sitaan barang bukti kasus korupsi diembat Rp 944 juta, "Hal itu menjadi tanggung jawab Budi secara pribadi," tegasnya.

Sebelumnya, atas kasus yang disidangkan oleh Kejari Denpasar itu, terdakwa Permadi divonis 15 tahun penjara. Oknum staf pidana khusus Kejati Bali itu memastikan menerima putusan itu tanpa upaya hukum lainnya. Selain hukuman 15 tahun penjara, Permadi juga akan mendapatkan tambahan hukuman dari tidak membayar denda dan pengembalian kerugian negara Rp 1,7 miliar. Total yang akan dijalani oleh Budi Permadi adalah 19 tahun penjara. (kmb37)



BOAT - Kondisi boat bantuan Kementerian Pariwisata yang nyaris tenggelam di Dermaga Kedisan. Bali Post/ina

Soal "Boat" Terbengkalai

Dewan Minta Disbudpar Bertanggung Jawab

Bangli (Bali Post) -

Kondisi kapal *boat* bantuan Kementerian Pariwisata yang kini terbengkalai dan nyaris tenggelam di Dermaga Kedisan Kintamani mengundang keprihatinan dewan. Atas kondisi itu Dewan meminta SKPD terkait dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bangli selaku pengelola, untuk bertanggung jawab dan tidak mengabaikan *boat* begitu saja. Jika memang sudah tidak lagi dimanfaatkan, Disbudpar diharapkan mengambil langkah yang terbaik dengan melelangnya.

Seperti yang disampaikan anggota Komisi II DPRD Bangli Gelgel Wisanawa, Jumat (24/7) kemarin. Dia mengaku prihatin melihat kondisi *boat* bantuan kementerian yang rusak dan terbengkalai begitu saja. Seharusnya kondisi ini tidak sampai terjadi jika dinas terkait yang mengelolanya bisa bertanggung jawab terhadap bantuan tersebut. Menurut Gelgel, atas kondisi *boat* yang seperti itu, Dis-

budpar harus segera mengambil langkah yang terbaik. Jika masih ingin dimanfaatkan, *boat* tersebut sebaiknya diperbaiki.

Namun, jika sudah tidak lagi dimanfaatkan, Disbudpar diharapkan mengambil langkah yang terbaik dengan melelangnya. "Lelang atau tidak tentunya harus dikaji oleh dinas terkait. Tentu persoalan ini dinas yang lebih tahu. Kalau sudah tidak bermanfaat silakan saja dilelang," terangnya. Dengan

Edisi : Sabtu, 25 Juli 2015

Hal : 8



Sambungan - - -

kondisi *boat* yang saat ini nyaris tenggelam dan cukup merusak pemandangan, dewan pun meminta Disbudpar untuk memindahkannya. Terlebih Dermaga Kedisan merupakan tempat pariwisata.

Sementara itu, Kabag Umum, Aset dan Perlengkapan Made Mahindra Putra saat dikonfirmasi terpisah mengatakan karena penggunaan barangnya ada di Disbudpar, maka tanggung jawab untuk memeliharanya ada di dinas tersebut. Sejauh ini pihaknya belum mengetahui apakah *boat* tersebut masih akan dimanfaatkan kembali oleh Disbudpar atau tidak. Jika ingin dimanfaatkan kembali tentunya harus dilakukan perbaikan dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan dan analisis biaya.

Namun jika *boat* tersebut akan dihapuskan, maka mekanismenya adalah Disbudpar selaku pengguna terlebih dahulu melaporkannya ke

Bagian Umum.

Sebagaimana pantauan *Bali Post* belum lama ini, kapal *boat* bantuan Kementerian Pariwisata itu terlihat dibiarkan terbengkalai di Dermaga Kedisan Kintamani. *Boat* yang berukuran cukup besar dan mewah tersebut dibiarkan dalam kondisi rusak dan tidak terawat. Bahkan karena tak pernah terurus, sebagian badan *boat* kini sudah mulai tenggelam ke dasar danau.

Kabid Bina Objek Disbudpar Bangli Wayan Bona saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu tak menampik bahwa *boat* bantuan dari Kementerian Pariwisata tahun 2009 tersebut memang sudah rusak parah. Menurut Bona, kerusakan *boat* terjadi akibat tidak ada petugas khusus yang memelihara. Selain itu pihaknya juga tidak menganggarkan biaya perawatan. Dia mengatakan *boat* itu nyaris tenggelam karena digoyang angin dan hujan lebat, sejak beberapa bulan terakhir. Atas kondisi itu pihaknya berencana akan menganggarkan perbaikan *boat* tersebut dalam Perubahan APBD tahun ini. Nantinya setelah diperbaiki, *boat* itu akan dicarikan pegawai khusus untuk memeliharanya. Tak hanya itu saja, *boat* tersebut rencananya juga akan disewakan. (kmb40)



Bali Post



Tak Jamin Bebas dari Penyimpangan

Dewan Soroti Opini WTP Pemprov Bali

Denpasar (Bali Post) -

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemprov Bali dari BPK-RI, menuai sorotan dewan. Pasalnya, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemprov Bali Tahun 2014 itu, masih ada beberapa temuan atau catatan. Khususnya, yang terkait dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

"Terkait SPI, ada empat temuan serta diberikan enam rekomendasi. Terkait kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, ada lima temuan serta diberikan lima rekomendasi," ujar Ketua Pansus Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014 Drs. Gede Kusuma Putra, M.M., Ak. dalam Sidang Paripurna DPRD Bali, Kamis (23/7) kemarin.

Kusuma Putra menambahkan, adanya temuan dan rekomendasi ini, tentu menimbulkan pertanyaan di kalangan awam. "Mengapa opini WTP tetap diberikan oleh BPK meski ada temuan terkait SPI dan Kepatuhan? Kami menyadari bahwa temuan-temuan tersebut tidak mempengaruhi secara signifi-

kan/material kewajaran penyajian informasi keuangan yang telah disusun sesuai dengan SAP disertai dengan pengungkapan yang cukup," imbuhnya.

Walaupun demikian, lanjut Kusuma Putra, Pemprov Bali wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan memberikan jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut tersebut kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. Selain itu, DPRD Bali juga diharapkan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan. "Sekaligus, ikut mendorong pemerintah daerah

untuk melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan BPK sesuai dengan kewenangannya, lebih khusus tindak lanjut atas rekomen-

si-rekomendasi yang mengandung unsur kerugian daerah," jelasnya.

Kusuma Putra melanjutkan, opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pasalnya, opini WTP tidaklah menjamin bahwa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran bebas dari penyimpangan. "Tidak menjamin juga pemerintah daerah telah memberikan kinerja terbaiknya untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.

Menanggapi hal ini, Gubernur Bali Made Mangku Pastika sepakat bila opini WTP memang tidak menjamin bebas penyimpangan. Mengingat, pemeriksaan dilakukan dalam waktu terbatas dan oleh orang yang terbatas jumlahnya. "Tetapi dengan adanya temuan itu, segera kita perbaiki karena itu temuan tidak signifikan, tidak material, hanya salah catat atau persoalan administrasi," ujarnya.

Selain opini WTP, Pansus Pertanggungjawaban APBD 2014 juga menyoroti Silpa Pemprov Bali yang rata-rata 24 persen atau hampir seperempat APBD



Berita ini bisa dikomentari
pada acara Citra Bali
Radio Global FM
Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

dalam empat tahun terakhir, serta beberapa capaian tahun 2014 yang masih di bawah target. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi yang ditarget 7,7 persen, terealisasi 6,18 persen. PDRB ditarget Rp 112,5 triliun, terealisasi Rp 106,25 triliun. PDRB per kapita ditarget Rp 27,37 juta, terealisasi Rp 25,88 juta. Inflasi yang ditarget 4,3 persen, terealisasi 8,43 persen. Tingkat kemiskinan (rata-rata nasional 10,96 persen) ditarget 3,68 persen, terealisasi 4,76 persen.

Pansus juga meminta Pemprov Bali membuat kebijakan dan program terobosan yang berdampak langsung terhadap kontribusi sektor primer. Mengingat, sektor primer seperti subak atau program Simantri kontribusinya selalu turun dari tahun ke tahun. Padahal, subak mendapat bantuan APBD selama 10 tahun terakhir dan program Simantri sudah berlangsung lima tahun. (kmb32)

Edisi : Jumat, 24 Juli 2015

Hal : 2